



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : DPR Tinjau Ulang bila Laporan BPK Janggal
Tanggal : Sabtu, 27 Oktober 2012
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

DPR Tinjau Ulang bila Laporan BPK Janggal

Masih banyaknya materi pemeriksaan yang belum selesai mengundang kecurigaan adanya tarik-menarik terhadap kepentingan BPK.

DONNY ANDHIKA

KECURIGAAN bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diintervensi terkait dengan hasil audit investigasi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, terus mengemuka.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Kasus Hambalang DPR, Zulfadli, menilai lamanya BPK menyerahkan hasil audit investigasi, yakni hingga 31 Oktober 2012, semakin memperkuat dugaan mengenai adanya upaya untuk melokalisasi kasus Hambalang.

"Kalau melihat perkembangan mundur dari penyampaian LHP (laporan hasil pemeriksaan) ke DPR, semakin kuat dugaan saya bahwa memang ada upaya untuk melokalisasi kasus Hambalang," tegas Zulfadli di Gedung DPR Jakarta, Kamis (25/10).

Oleh karena itu, Zulfadli menganjurkan, apabila di dalam laporan audit tersebut ada kejanggalan dan kekurangan terhadap proses pemeriksaan, Komisi X DPR bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR akan meninjau ulang laporan audit tersebut.

Sebelumnya, anggota BPK Taufiqurachman Ruki sempat menyatakan bahwa BPK telah diintervensi pihak-pihak tertentu. Pernyataan itu terkait dengan hilangnya nama Menpora Andi Mallarangeng dan sejumlah kontraktor yang terlibat proyek Hambalang dari kesimpulan audit.

Hal itu, menurut Zulfadli, diperkuat lagi dengan pemeriksaan BPK terhadap beberapa orang termasuk Menpora. Terlebih, saat pernyataan Ruki itu keluar,

laporan yang akan diserahkan ke DPR kurang dari sepekan lagi itu masih berada dalam tahap pertama.

"Berarti, masih banyak materi pemeriksaan yang belum dilakukan. Mungkin saja terjadi tarik-menarik terhadap kepentingan BPK. Indikasinya semakin kuat berarti," tandasnya.

Rampung

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengatakan LHP atau lebih dikenal dengan audit investigasi kasus dugaan mark-up anggaran pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, sudah selesai.

Meski demikian, BPK masih memeriksa ulang agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan.

"Sekarang LHP kasus Hambalang sudah disepakati di Sidang Badan. Tinggal memeriksa ulang agar LHP ini bebas dari kesalahan aritmatika dan kekeliruan semantik yang dapat mengakibatkan salah penafsiran," kata Hasan, Kamis (25/10).

Hasan juga mengatakan bahwa beberapa hari belakangan ia harus menyelesaikan persoalan internal BPK terlebih dahulu.

"Untuk menjaga laporan hasil pemeriksaan kasus Hambalang tetap *in line* dengan kertas kerja pemeriksaaannya," kata Hasan.

Selain itu, masih kata Hasan Bisri, internal BPK harus meluruskan fakta pemeriksaan yang menjadi permasalahan belakangan ini.

"Sambil meluruskan fakta pemeriksaan yang diputar balik sehingga mengakibatkan adanya *misleading* dan *misinformation* di masyarakat," tukasnya. (**/X-9)

danny@mediaindonesia.com